

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

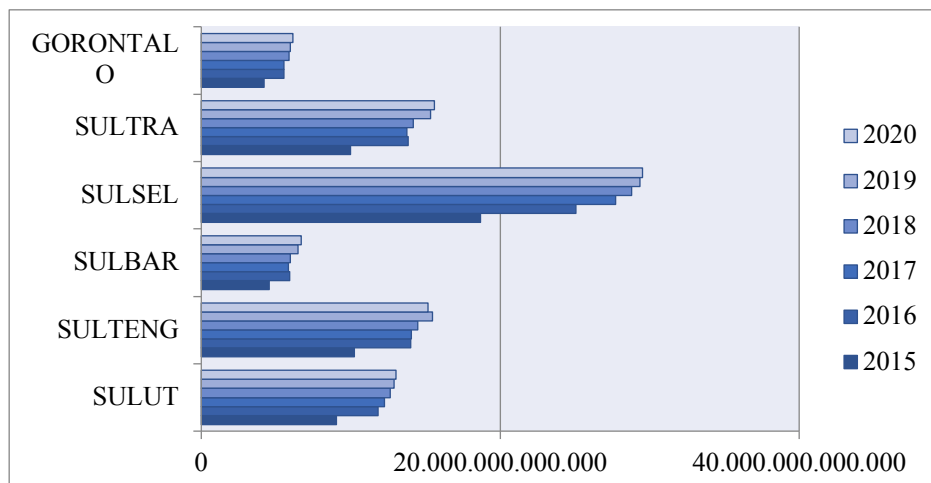
Lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 33 Tahun 2004. Sistem dan mekanisme pengelolaannya berubah. Di semua bidang, pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Selain otonomi daerah, ada juga desentralisasi, baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi, dan perencanaan lainnya, semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun pedoman penggunaan dana perimbangan transfer dan pendapatan daerah atau sumber pendapatan daerah yang sah.

Pembayaran transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah, dan akan ditampilkan dalam perhitungan APBD nanti. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan anggaran antar pemerintah dan memastikan bahwa semua daerah memenuhi standar pelayanan publik minimum.

Dana transfer desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam beberapa tahun berjalan dari

tahun 2015- 2020, proporsi dana perimbangan se Sulawesi terhadap penerimaan daerah masih cukup tinggi dibandingkan penerimaan yang lain.

Dilihat pada Gambar 1.1, pada tahun 2015 total transfer dana yang diterima se Sulawesi sebesar Rp 56.663.894.725.843; tahun 2016 sebesar Rp 76.183.611.258.030; pada tahun 2017 sebesar Rp 79.146.701.431.448; tahun 2018 sebesar Rp 81.864.103.052.256; pada tahun 2019 sebesar Rp 85.478.018.351.192 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 86.158.144.909.891. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketergantungan di berbagai provinsi se Sulawesi terhadap transfer dana dari pusat masih cukup tinggi. Ketergantungan seperti ini harus diminimalisir agar pelaksanaan desentralisasi dapat benar-benar terwujud.



Sumber : Portal Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 1. 1 Total Dana Transfer se Sulawesi pada Tahun 2015-2020

Dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pengeluaran infrastruktur dan kegiatan produksi lainnya. Pengeluaran produktif yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum akan mendorong pembangunan ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur mendorong Dana Bagi Hasil, Dana

Bagi Hasil dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

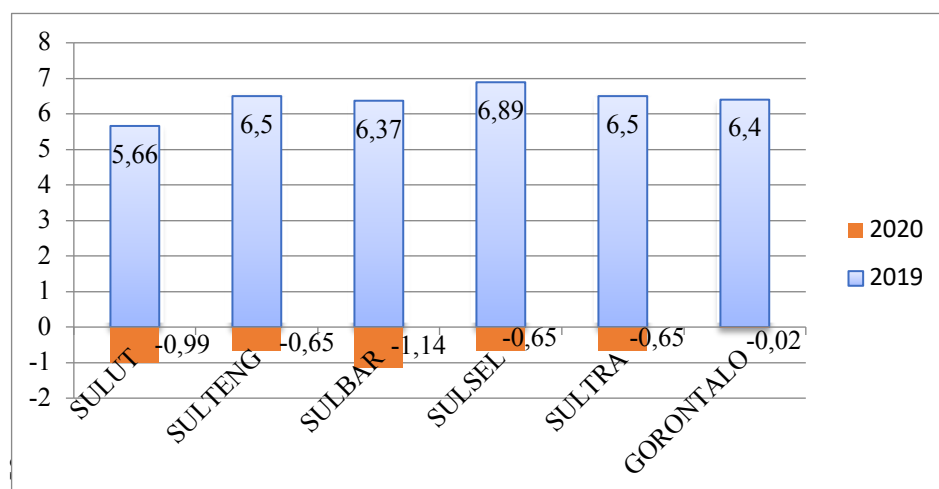
Penggunaan dana perimbangan yang saat ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah, membuat pemerintah daerah memegang peranan penting. Kemana dana perimbangan akan dialokasikan dan didistribusikan sangat mempengaruhi manfaat dari dana perimbangan tersebut. Saat pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan alokasi ke belanja modal melalui pembangunan infrastruktur, maka dana perimbangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya infrastruktur yang baik maka akan mengundang minat para investor yang secara umum membantu menggiatkan kegiatan ekonomi, dan selanjutnya tentu saja membuka berbagai lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. Belanja modal merupakan salah satu komponen yang dapat di andalkan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Sebab, dengan semakin tingginya belanja modal maka akan semakin tinggi pula produktivitas ekonomi. (Hasan, 2015) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Yovita, 2011) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Di era otonomi, setiap daerah berlomba-lomba mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi

mendorong pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, sehingga mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerah (Kuncoro, 2004). Kapasitas pertumbuhan suatu wilayah sangat bergantung pada berbagai faktor ekonomi, beberapa di antaranya saling mempengaruhi.

Melihat pertumbuhan ekonomi se Sulawesi akhir-akhir ini telah mengalami kontraksi pada tahun 2020. Pada Provinsi Sulawesi Utara pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penerunan sebesar -0,99 persen; pada provinsi Sulawesi Tengah sebesar -0,65 persen; pada provinsi Sulawesi Barat sebesar -1,14 persen; pada provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,65 persen dan pada Se Sulawesi mengalami penerunan sebesar -0,02 persen tahun 2020 (dapat dilihat pada Gambar 1.2)



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2015-2020

Berdasarkan fenomena di atas perlunya untuk mengkaji lebih lanjut dana transfer yang akan dialokasikan di berbagai daerah se Sulawesi meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi se Sulawesi dengan judul penelitian “**Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi?
4. Berapa besar Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi

4. Untuk Mengetahui Berapa besar Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi se Sulawesi.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan kajian mengenai dana transfer efektifitas serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa atau pihak manapun yang berminat dalam melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi beberapa pihak, khususnya kepada pemerintah daerah se Sulawesi dalam rangka mengalokasikan dana transfer yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.